

Representasi Hegemoni Kekuasaan pada Zaman Kolonial dan Orde Baru dalam Novel *Balada Supri*

SYAHROTUL LATIFAH

syahrotull@gmail.com

CANDRA RAHMA WIJAYA PUTRA

candra_rwp@umm.ac.id

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia

dikirim: 9/1/2020 diperbaiki: 15/4/2020 diterima: 5/5/2020 DOI: 10.22515/ljbs.v5i1.2107 hlm: 65-82

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the social structures and the forms of power as well as their repetition from colonial era to New Order. This study used a sociological approach to literature with the theory of power hegemony proposed by Gramsci. This research was a type of descriptive-qualitative research. The data in this research are narratives, dialogues, and monologues quoted from the novel *Balada Supri* written by Mochamad Nasrullah. The results of this research showed that in the colonial era, the social structure consisted of colonizer and colonized group whereas in New Order era, there were government official group, which was supported by the capital owner group, and ordinary people group. In regard with the form of power, colonial era showed the dominance of violence and hegemony that was countered by native resistance through violence as well. Meanwhile, in New Order era, there appeared to be violence and hegemony dominance with the resistance in the form of hegemony over intellectuals. On the other hand, the social structure and the form of power in the colonial era, particularly the dominance of violence, still continued in New Order era and was termed as neocolonialism.

Keywords: colonial era, New Order era, social structure, form of power

PENDAHULUAN

Sistem kekuasaan yang dilaksanakan oleh penguasa di Indonesia memiliki perbedaan setiap zamannya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh bentuk kekuasaan yang diterapkan penguasa. Sejarah panjang bentuk kekuasaan yang pernah diberlakukan di Indonesia merupakan serangkaian kekuasaan yang sebenarnya menjadi titik tolak perbaikan di bidang kekuasaan hingga saat ini (Purnaweni 2004). Narasi sejarah kekuasaan asing di Indonesia dapat ditelusuri mulai abad ke-15. Pada abad ini, bangsa Barat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra untuk mencari dunia Timur. Ekspedisi tersebut berkaitan dengan tujuan utama mereka yaitu mencari rempah-rempah. Dampak dari hal tersebut, Indonesia mengalami masa penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat hingga akhir abad ke-19 (Amin 2017).

Akhir abad ke-19, Indonesia berhasil merebut kekuasaan dari kolonial yang ditandai dengan dimulainya masa kemerdekaan Indonesia. Periode ini bergerak cepat dengan diangkatnya Presiden Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia yang dikenal dengan masa Orde Lama. Gejolak pemerintahan dengan berbagai permasalahannya menyebabkan kekuasaan Orde Lama berakhir. Pergantian kekuasaan terjadi ketika Indonesia saat itu mengalami dwi kepemimpinan, yang kemudian dengan turunnya Supersemar 1966, presiden Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto. Dimulai dengan serangkaian operasi penumpasan pemberontakan PKI pada tahun, masa pemerintahan Soeharto kemudian dikenal dengan nama Orde Baru. Masa kekuasaan Soeharto selama 32 tahun, diakhiri dengan peristiwa kerusuhan tahun 1998 (Purnaweni 2004).

Garis perjalanan sistem kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia juga berdampak pada hasil penciptaan karya sastra yang sejatinya merujuk pada kondisi sebenarnya kala itu (Ardiono, Nisa & Harijaty 2019). Pengarang

merepresentasikan sebuah sistem kekuasaan dalam karya sastra yang ditambah dengan hasil imajinasi dan gaya kepenulisannya. Hasil kombinasi hal tersebut yaitu timbulnya estetika yang dapat dinikmati masyarakat melalui karya sastra yang diciptakan pengarang (Sugiarti 2016).

Salah satu novel yang menarik untuk dikaji berdasarkan topik perkembangan kekuasaan dari zaman kolonial hingga zaman Orde Baru yaitu novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah. Novel *Balada Supri* merupakan novel pemenang III sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2018. Novel ini merepresentasikan sistem pemerintah yang pernah dialami sebuah keluarga selama empat generasi. Setiap generasi yang diceritakan dalam novel memiliki latar dan kondisi yang merepresentasikan zaman pada waktu itu. Zaman setiap generasi dimulai dari tokoh generasi pertama yaitu Perompak Djaka, Djoko Telu, Djoko Tole, dan Supri Kumbang. Generasi ini ditutup dengan lahirnya generasi kelima yaitu Supri Burung.

Gramsci (dalam Anwar 2015) mengemukakan bahwa karya sastra yang berkualitas adalah karya sastra yang menunjukkan keterlibatan pengarangnya dengan sejarah yang sedang mewujudkan diri. Generasi yang dibangun oleh penulis secara tidak langsung merepresentasikan keadaan sistem kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, penggambaran sistem kekuasaan dengan segala subjektivitasnya pada dasarnya digunakan sebagai penanda bahwa masyarakat pernah mengalami segala bentuk hegemoni pemerintah pada saat itu, sehingga timbul keterlibatan proses sejarah dengan pengarang yang merepresentasikannya.

Sebagai bahan referensi sekaligus perbandingan, dalam penelitian ini, peneliti juga mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Salah satu di antaranya karya Marlina (2017) yang berjudul *Analisis Poskolonialisme dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur*. Hasil penelitian ini berupa unsur-unsur intrinsik novel dan nilai poskolonialisme dalam novel *Tanah Surga Merah*. Nilai-nilai poskolonialisme yang dianalisis pada novel ini meliputi nilai hibriditas, hegemoni, dan *subaltern*, sehingga tidak terfokus pada aspek hegemoni saja. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Supriyadi (2018) dengan judul *Gaya Kepemimpinan Presiden di Indonesia*. Titik fokus dalam penelitian ini yaitu gaya dan penggambaran kekuasaan oleh presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap presiden yang menjabat memiliki cara pandang dan pola kepemimpinan yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia lebih baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Suhar, Hudiyono, & Hanum (2019) dengan judul *Analisis Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur: Sebuah Kajian Hegemoni Gramsci*. Penelitian ini berupa analisis novel dengan kajian hegemoni Gramsci ditambah dengan pendekatan strukturalisme dengan tujuan menemukan adanya fakta dan formasi ideologi dalam novel tersebut. Dalam hal ini, aspek hegemoni dibagi menjadi hegemoni masyarakat sipil, masyarakat politik, dan kaum intelektual. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada objek kajian. Dipilihnya novel kontemporer *Balada Supri*, serta pengangkatan aspek-aspek sosial dalam novel, membuat kajian hegemoni kekuasaan di Indonesia dari masa kolonial hingga Orde Baru lebih terlihat. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan struktur sosial dan bentuk kekuasaan, yaitu berupa dominasi dan hegemoni yang dilakukan oleh penguasa dalam cerita novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah, dengan menggunakan teori hegemoni kekuasaan Antonio Gramsci.

KERANGKA TEORI Masing-masing zaman yang tergambar dalam novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah menunjukkan pertentangan-pertentangan antarkelas sosial. Pertentangan tersebut mengindikasikan adanya gejolak sosial yang digambarkan pengarang melalui karyanya. Pertentangan dan gejolak kelas sosial yang tergambar dalam novel tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori hegemoni kekuasaan Antonio Gramsci.

Pandangan Gramsci tentang hegemoni merupakan suatu bentuk kritik adanya teori Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx. Hegemoni diartikan sebagai sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya yang dapat dilakukan melalui institusi di masyarakat sebagai penentu struktur-struktur kognitif dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pada hakekatnya hegemoni merupakan upaya untuk menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Gramsci (1971) mengatakan bahwa kontrol di seluruh masyarakat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sipil. Kontrol tersebut dilakukan berdasarkan kebanyakan massa yang tunduk terhadap arahan yang diterapkan. Umumnya arahan tersebut berkembang hingga ada terdapat suatu keadaan historis *bloc*.

Konsep hegemoni (Gramsci, Bellamy, & Cox 1994) sebenarnya dapat dielaborasi melalui basis supremasi kelas. Supremasi adalah sebuah kekuasaan tertinggi yang dapat ditandai dan diwujudkan melalui dua cara yaitu sebagai 'dominasi' dan sebagai 'kepemimpinan intelektual dan moral'. Dominasi langsung adalah komando yang dilaksanakan oleh *subaltern* pemerintah atas nama kelompok dominan. Dalam keadaan hegemoni gagal, terdapat suatu aparat negara yang bisa memaksa kehendaknya terhadap rakyat yang sedang melawan arahan kelas dominan (Gramsci 1971). Cara-cara tersebut diwujudkan untuk mengambil kekuasaan kelompok sosial tertentu atas satu kelompok sosial oposisi. Dalam satu pihak, suatu kelompok sosial mendominasi kelompok sosial oposisi dengan menghancurkan atau menundukkan bahkan dengan kekuatan bersenjata. Selain mendominasi dengan kekerasan, penerapan sebuah kepemimpinan dengan ideologi yang dimiliki digunakan untuk memenangkan sebuah kekuasaan.

Kekuasaan dengan menanamkan sebuah ideologi dan dipercaya kaum penguasa akan dengan mudah dilakukan kepada kelompok sosial yang belum memiliki pola pikir bebas. Ideologi menyatu dengan suatu organisasi yang berisi suatu rujukan untuk kegiatannya (Gramsci 1971). Gramsci (1971) juga merumuskan konsepnya merujuk pada situasi sosial politik yang ada di masyarakat yang telah menyatu dalam sebuah praktek sosial. Selain itu, hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi kelas sosial yang lebih tinggi dari kelompok sosial lain yang dibagi atas kaum borjuis dan kaum proletar. Pembagian tersebut merupakan bentuk hegemoni kapitalisme.

Berdasarkan teori perbedaan kelas sosial yang telah dikemukakan di atas, kelas sosial akan memperoleh keunggulan atau supremasi melalui dua cara, yaitu melalui cara dominasi atau paksaan, dan yang kedua, melalui kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, Bellamy, and Cox 1994). Berdasarkan pandangan Gramsci tersebut, maka penguasaan melalui kepemimpinan intelektual, moral, dan ideologi disebut dengan hegemoni. Merujuk hal tersebut, struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat telah merujuk pada pandangan Gramsci bahwa terdapat hierarki kelas sosial seperti dalam supremasi kelas meliputi kelas atas dan kelas bawah. Dengan struktur sosial tersebut, kelompok kelas atas dapat menerapkan bentuk

kekuasaan untuk dapat menguasai kelompok kelas bawah. Bentuk kekuasaan, menurut Gramsci dilakukannya sebuah dominasi atau kekerasan dengan hegemoni. Kelompok kelas atas pada mulanya menerapkan dominasi sehingga memunculkan stigma tertentu secara terus-menerus, sedangkan kelompok kelas bawah menjadi kelompok yang menerima dengan tidak sadar bahwa mereka telah berhasil dikuasai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah yang lebih menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis bagi pemantapan makna sebagai simpulan penelitian. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang mendeskripsikan dan menganalisis struktur sosial dan bentuk kekuasaan dari zaman kolonial sampai zaman Orde Baru. Menurut Sugiyono (2009) analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Menurut Faruk (2015), sosiologi merupakan wilayah kajian yang menyangkut masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya, termasuk dalam tataran sosial, ekonomi, politik yang berkembang dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah. Data dalam penelitian berupa kutipan dialog dan narasi dalam novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah yang berisi tentang struktur sosial dan bentuk kekuasaan pada zaman Kolonial sampai zaman Orde Baru.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi data menurut Endraswara (2013) sebagai berikut: (1) membaca dan memahami Novel *Balada Supri* karya Mochamad Nasrullah untuk mengungkap jalan cerita dan maksud pengarang menulis karya tersebut; (2) membaca dan memahami ruang lingkup teori yang digunakan sebagai bahan analisis; (3) pencarian data dalam novel dengan cara mengidentifikasi data berupa kutipan yang berwujud dialog dan narasi; (4) menyeleksi data dengan menandai bagian yang dianggap penting sesuai dengan titik fokus penelitian; (5) menyusun data dalam struktur yang sistematis dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian dan mengklasifikasikan data ke dalam korpus data; dan (6) menganalisis dan menginterpretasikan data sesuai dengan elemen yang dikaji.

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap berdasarkan teknik analisis model aliran Miles dan Huberman (dalam Mujiyanto, 2019) dengan langkah-langkah meliputi: (1) tahap reduksi data yaitu dengan mengerucutkan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian; (2) tahap penyajian data yaitu penyajian data dan siap untuk dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif; (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu bagian dari konfigurasi yang utuh, penarikan kesimpulan juga langsung diverifikasi selama penelitian.

PEMBAHASAN

Melalui novel *Balada Supri*, Mochamad Nasrullah menggambarkan beberapa zaman yang berbeda, yaitu mulai dari zaman kolonial hingga Orde Baru. Bagian *Pembahasan* ini akan membicarakan mengenai struktur sosial dan bentuk kekuasaan dari zaman yang berbeda tersebut. Tokoh utama dalam novel, yaitu Supri Kumbang, diceritakan memiliki pengalaman hidup terkait perlakuan penguasa dan bentuk kekuasaan yang diterapkan pada zaman

sebelumnya. Zaman tersebut dimulai dari tokoh dari generasi pertama, yaitu Djaka, yang memutuskan untuk menjadi perompak agar bisa menentang dan menenggelamkan kapal kompeni yang singgah di perairan Indonesia. Jelas kedatangan kompeni sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ekonomi. Selanjutnya, generasi kedua adalah Djoko Telu, yang merupakan anak terakhir dari Perompak Djaka sedangkan generasi ketiga adalah Djoko Tole, yang mewarisi kesaktian Djoko Telu di lautan. Generasi keempat, yaitu Supri Kumbang, banyak mengalami jatuh-bangun. Gaya kekuasaan zaman Orde Baru menjadikan Supri Kumbang sering mengalami pembuangan, penuduhan, dan ancaman yang dilakukan oleh rezim pemerintahan. Selama masa pembuangan, anak Supri tumbuh dewasa seiring waktu dan kemudian menjadi generasi terakhir dalam novel, yakni Supri Burung, yang hidup di zaman Reformasi.

Akibat perbedaan zaman, bentuk kekuasaan dan aturan yang diterapkan oleh penguasa juga berbeda-beda. Penguasa adalah kelompok sosial yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat. Pada zamannya, penguasa merupakan sebuah kelompok sosial yang mendominasi atas kelompok sosial oposisi dengan tata cara penguasaan yang berbeda dengan zaman yang lain. Berikut representasi struktur sosial dan bentuk kekuasaan pada zaman kolonial hingga Orde Baru.

Struktur Sosial Masyarakat Zaman Kolonial dan Orde Baru

Kelompok sosial merupakan kumpulan beberapa orang yang memiliki satu visi dan misi yang sama untuk membawa kelompok tersebut menjadi dominan di masyarakat (Hadi & Kasuma 2012). Sejak zaman kerajaan di Indonesia, terdapat dua perbedaan kelompok sosial yang terdiri atas keluarga kerajaan dan rakyat jelata. Rakyat jelata selalu menuruti apa kata raja yang berlaku saat itu. Perbedaan kelas sosial tersebut disebut dengan feodalisme. Dalam novel, pengarang tidak menggambarkan kehidupan feodalisme. Meskipun demikian, di dalam novel dibahas dua kelompok sosial yang berperan sebagai penguasa dan kelompok yang dikuasai. Menurut Gramsci (dalam Patria & Arief 2015) pembagian dua kelompok besar itu akan selalu ada melalui konsep hegemoni yang menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika berdasarkan sesuatu yang telah dipercayai.

Zaman kolonial

Penjajahan bangsa Barat atas Negara Indonesia dikenal dengan istilah kolonialisme. Kolonialisme merupakan paham tentang penguasaan atau penundukan suatu negara dengan tujuan tertentu (Harkantiningasih 2014). Kedatangan bangsa kolonial di Negara Indonesia pada awalnya sangat diterima oleh masyarakat karena tujuan mereka hanya untuk berdagang, namun semakin lama bangsa kolonial menggencarkan paksaan demi tujuan mereka.

Berdasarkan perbedaan dua kelompok sosial yang saling berseteru pada zaman kolonial terdapat dua kubu, yaitu kelompok penjajah dan kelompok terjajah. Kelompok penjajah merupakan kelompok yang berhasil menguasai perdagangan dan mengambil alih sistem kekuasaan yang terdapat dalam suatu daerah. Digambarkan bahwa kelompok penjajah merupakan kelompok kolonial bangsa Barat yang berhasil mengambil alih kekuasaan di beberapa wilayah Indonesia. Berikutnya, yaitu kelompok terjajah, diwakili oleh pribumi yang berhasil dikuasai dengan kebijakan yang dibuat oleh kelompok penjajah. Selain itu, dari kacamata kolonialisme, bangsa Barat ditempatkan sebagai kelompok sosial yang lebih unggul dari bangsa Timur. Hal ini tampak pada studi poskolonialisme yang disebut sebagai orientalisme (Ananta 2017).

Menurut Said (dalam Ananta 2017), bangsa Barat beranggapan bahwa bangsa Timur adalah bangsa yang primitif, bodoh, dan melarat. Hanya bangsa Barat yang terhormat.

Kelompok sosial yang ada di zaman kolonial, keberadaannya dirasakan hingga generasi ke generasi dalam novel *Balada Supri*. Generasi yang menjadi tokoh utama pada zaman kolonial adalah Djaka dan anaknya Djoko Telu. Djaka memutuskan menjadi perompak untuk menolong warga yang merasa terpinggirkan karena kebijakan yang diterapkan oleh kompeni. Djoko Telu memiliki cara pandang yang jauh ke depan untuk melindungi anaknya dari kompeni dan lebih memilih pergi meninggalkan ayah dan saudaranya serta melepaskan diri dari bayang-bayang Djaka.

Kedua abangku sangat mendukung apa yang sudah menjadi keputusan Ayah. Mereka ikut terbakar amarah saat mengetahui kalau kompeni mulai mengutip pajak dari nelayan, kata Djoko Telu yang dengan sabar menjelaskan. Setelah mengubah posisi duduknya menjadi menghadap istrinya, Djoko Telu melanjutkan penjelasannya (86).

Dari kutipan tersebut diketahui adanya struktur sosial yang terdiri atas dua kelompok sosial di zaman kolonial yaitu kelompok penjajah dan kelompok terjajah. Kelompok penjajah yang diwakili oleh kompeni melakukan suatu kebijakan yang sangat merugikan kelompok terjajah. Kelompok terjajah yaitu pribumi yang merasakan akibat dari kebijakan yang diterapkan oleh kompeni. Seperti dalam kutipan, kelompok penjajah menerapkan segala kebijakan agar dapat melancarkan jalan untuk menguasai lautan. Nelayan diperbolehkan melaut tetapi dengan syarat membayar pajak kepada kompeni. Berdasarkan peristiwa tersebut, pribumi yang menempati struktur sosial kelompok terjajah dengan terpaksa menuruti dan melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan kompeni. Pada struktur sosial di zaman kolonial, terdapat struktur sosial kedua di bawah kekuasaan kompeni, yaitu ketua kampung yang masuk dalam kelompok penguasa tetapi berada di bawah kekuasaan kompeni, seperti dalam kutipan berikut.

Kontol paus! Keluh Djaka kepada ketiga anaknya. Ia baru saja mengetahui kalau ketua kampungnya mendapat jatah yang cukup banyak untuk mendukung kompeni. Mau bagaimana lagi memang, ketimbang mati, ketua kampungnya memilih mendapatkan sedikit keuntungan. Sejak itu, Djaka pergi berlayar selama beberapa hari untuk mencari wangsit. Dan ketika pulang, ia katakan kepada orang-orang kepercayaannya, termasuk anak-anaknya untuk merompak kapal-kapal besar milik kompeni (87).

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa Djaka telah mengetahui sikap dibalik keputusan yang ditunjukkan ketua kampung kepadanya perihal kebijakan kompeni. Di balik sikap keputusan yang ditunjukkan oleh ketua kampung, terdapat sebuah kesepakatan yang telah dilakukan oleh ketua kampung dengan pihak kompeni. Ketua kampung lebih memilih untuk berkoloni dengan kompeni karena ia berpikir tidak ada jalan lain agar hidup pribadinya lebih baik ketimbang ia mati secara perlahan. Jalan yang dipilih oleh ketua kampung yaitu menuruti segala kebijakan dari kompeni kemudian ia mendapat jatah dan keuntungan dari mereka. Dari kutipan tersebut terlihat struktur sosial pada zaman kolonial, yakni kedudukan tertinggi dipegang oleh kelompok penjajah dan di bawahnya terdapat kelompok perangkat desa yang diwakili oleh ketua kampung. Ketua kampung termasuk ke dalam kelompok penguasa, namun berada di bawah kekuasaan kelompok penjajah.

Kelompok penjajah yang dipegang oleh kompeni bertindak sebagai pemegang kunci kekuasaan atas kelompok terjajah. Kelompok terjajah terdiri atas aparaturnya setempat dan pribumi. Aparatur daerah yang terdiri atas ketua kampung dan perangkatnya dalam struktur sosial berada pada posisi penguasa yang kedua di bawah kompeni. Pribumi sebagai kelompok sosial yang terjajah berperan sebagai kelompok sosial yang mengalami marginalisasi dalam tatanan masyarakat. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak penjajah sangat dirasakan oleh pribumi.

Gramsci (dalam Patria & Arief 2015) mengakui bahwa dalam setiap satuan masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan diperintah. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan interpretasi Gramsci, penguasa akan menjalankan model kekuasaannya secara tiran atau tidak sama sekali. Hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan penguasa dalam melayani dan mengakomodasi kelompok yang dikuasai. Gramsci (dalam Irwan & Edriana 1995) mengatakan bahwa dalam sebuah formasi sosial selalu ada dua kelompok sosial yang saling berhadapan, yaitu bangsawan dan rakyat. Kelompok bangsawan selalu memiliki keinginan untuk memerintah dan mendominasi. Sebaliknya, rakyat berkeinginan untuk tidak diperintah ataupun didominasi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa di dalam struktur sosial masyarakat pada zaman kolonial, kelompok penjajah, yaitu kompeni, menempati posisi atau strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi sebagai penduduk asli. Hierarki tersebut dapat dilihat dengan adanya kepatuhan pribumi kepada kolonial. Kepatuhan tersebut menempatkan posisi kompeni berada di atas pribumi sebagai pemegang kekuasaan. Di antara kompeni dan pribumi, terdapat kelas yang masih memiliki andil kekuasaan yaitu ketua kampung atau yang disebut dengan perangkat desa. Kelompok tersebut menguasai pribumi akan tetapi tetap masuk dalam wilayah kekuasaan kompeni. Kompeni sebagai kelompok penjajah menggunakan kekuasaannya secara tiran agar rakyat mau menyetujui segala kebijakan yang telah ditetapkan.

Zaman Orde Baru Transisi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan konstelasi politik Indonesia yang mengalami perubahan sebagai akibat dari peristiwa G30S/PKI.. Karen Brooks (Sanita & Rianto 2018) mengatakan bahwa penciptaan stabilitas pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno bertumpu pada dua kekuatan politik yaitu ABRI dan PKI. Dihukum matinya Letnan Untung dalam pemberantasan PKI menjadi awal berkiprahnya Mayjen Soeharto sebagai penerima mandat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pascapembubaran PKI. Dalam ketidakstabilan politik dan ekonomi, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang mengisyratkan diserahkannya kekuasaan kepala negara kepada Mayjen Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto ini dikenal dengan istilah Orde Baru.

Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang paling lama di Indonesia. Banyak kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap keras dan tidak demokratis. Pada zaman ini, terdapat dua kelompok sosial yaitu pemerintah dan rakyat. Pemerintah sebagai pemegang hegemoni dan rakyat sebagai kaum yang terhegemoni. Pada masa ini, pemerintah berhasil menerapkan aturan yang dapat membungkam aspirasi dan pendapat rakyat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Akhir-akhir ini Supri Kumbang sibuk mengecam aksi para pemilik modal yang ingin mengindustrikan perkebunan. Memang pada tahun-tahun itu, negaranya sibuk untuk menjadi lumbung bahan pangan. Namun praktek yang sudah-sudah sungguh mengecewakannya. Para warga rela menjual tanahnya dengan harga yang dibohong-bohongi, banyak yang kini menjadi pekerja kasar yang kebutuhannya sering diabaikan. Masalahnya sederhana, para pemilik modal ingin keuntungan yang masuk ke kantong pribadinya cukup untuk menghidupi turunannya hingga beribu tahun lagi (150).

Berdasarkan kutipan tersebut, tampak ada dua kelompok sosial pada masa Orde Baru, yaitu pemilik modal sebagai penguasa dan yaitu rakyat biasa sebagai pihak yang dikuasai. Pemilik modal dengan kekuasaannya menerapkan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat biasa. Rakyat biasa menjadi kelompok sosial yang termaginalkan karena kekuasaan pemilik modal, sehingga mereka tidak dapat bertindak apa-apa untuk lebih memakmurkan dirinya. Mereka hanya bisa menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Kesulitan rakyat menyampaikan aspirasi ini memicu keberanian Supri Kumbang. Melalui tulisan di surat kabar, Supri Kumbang mengecam kelompok pemilik modal yang telah menetapkan harga yang membuat rakyat biasa merasa keberatan.

Bentuk Kekuasaan pada Zaman Kolonial dan Orde Baru

Setiap penyelenggaraan kekuasaan memiliki perbedaan bentuk atau ciri sesuai dengan masanya. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa pada masa itu. Demikian pulayang terjadi di Indonesia. Berikut ini temuan mengenai struktur sosial yang ada pada zaman kolonial yang terdiri dari kelompok penjajah, yaitu kompeni, dan kelompok terjajah, yaitu pribumi.

Kedua abangku sangat mendukung apa yang sudah menjadi keputusan Ayah. Mereka ikut terbakar amarah saat mengetahui kalau kompeni mulai mengutip pajak dari nelayan, kata Djoko Telu yang dengan sabar menjelaskan. Setelah mengubah posisi duduknya menjadi menghadap istrinya, Djoko Telu melanjutkan penjelasannya.

Mulai dari perahu sampai jumlah ikan, semua ada harganya. Belum lagi pengaturan mengenai sasaran ikan dan batas perahu menurunkan jangkar. Itu semua meresahkan banyak nelayan. Bisa kau bayangkan, setelah kompeni itu banyak mendatangkan kapal-kapal besar untuk menangkap ikan, berapa banyak ikan yang bisa diambil para nelayan? Djoko Telu menghela napas sambil memegang keningnya (86).

Dari kutipan di atas tampak bahwa kelompok penjajah, yang diwakili oleh kompeni, melaksanakan bentuk kekuasaan dominasi atau kekerasan dengan menerapkan kebijakan yang sangat merugikan kelompok terjajah. Penarikan pajak atas seluruh pekerjaan nelayan kecil membuat kelompok terjajah menjadi takut untuk berlayar. Penerapan kebijakan tersebut, membuat kelompok penjajah dengan sangat mudah membentangkan layar kapal-kapal besar mereka tanpa takut tersaingi oleh kapal nelayan warga. Apabila kapal nelayan nekat untuk berlayar, kelompok penjajah juga tetap diuntungkan karena adanya pajak yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, pajak yang dimaksudkan oleh kelompok kompeni sebenarnya merupakan suatu bentuk perampasan yang dibuat seolah-olah bukan sebuah perampasan. Kelompok kompeni membuat peraturan-peraturan resmi yang menguntungkan mereka. Peraturan –peraturan tersebut menunjukkan adanya upaya penjajah untuk menjadikan pajak sebagai suatu hal yang wajar, benar, dan tanpa unsur pemaksaan.

Keterbatasan yang dialami oleh warga kampungnya juga ditanggapi oleh Djoko Telu dengan menghela napas tanda menyerah ketika ia bercerita kepada istrinya.

Djaka menjadi gusar terhadap keluhan-keluhan yang ia dengar dari warga desa, semakin lama, keluhan itu menjadi rintihan kelaparan. Djaka akhirnya mengadakan semua permasalahan ini kepada ketua kampung ketika upayanya membagi-bagikan ikan tidak cukup. Tetapi ia ditanggapi dengan keputusan dari ketua kampungnya.

Tak habis akal, Djaka menemui para kompeni yang tempatnya terasa mewah dan banyak pengawal bersenjata. Djaka menuntut agar segala macam perubahan yang diberlakukan kompeni dihapuskan. Tentu saja ia diabaikan sebab, walalupun ia dipandang sebagai orang yang berpengaruh, Djaka tidak menjadi perangkat desa. Dengan begitu, ia bukan siapa-siapa (87)

Menelisik kutipan di atas, Djaka sebagai bagian dari kelompok terjajah merasa sangat resah dengan keluhan-keluhan warga sekitarnya yang berujung pada rintihan kelaparan. Di sini tampak bahwa Djaka telah berusaha membantu warga desa yang mengalami kesulitan untuk melaut sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan oleh kompeni. Kebijakan dari kompeni yang paling membuat resah warga kampung adalah penetapan pembayaran pajak yang sangat memberatkan. Namun, apabila pajak tidak dibayarkan warga tidak bisa melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat kebijakan yang telah ditetapkan oleh kompeni tersebut, warga merasa sangat kesulitan secara ekonomi. Djaka berusaha untuk memperbaiki keadaan warga kampungnya. Ia rela membagikan ikan-ikan tangkapannya untuk diberikan kepada warga desa. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh Djaka belum membuahkan hasil karena kebutuhan warga desa belum sepenuhnya tercukupi. Kesusahan warga semakin lengkap dengan sikap ketua kampung yang putus asa dan tidak mau mengurus permasalahan pajak ini.

Di sisi lain, Djaka juga berusaha menemui kelompok penjajah untuk menghapuskan segala kebijakan yang sangat tidak manusiawi. Usaha yang dilakukan oleh Djaka tidak digubris oleh kaum penjajah karena ia bukanlah perangkat desa. Djaka hanyalah rakyat biasa yang berusaha menentang dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Pihak penjajah hanya mau menerima pendapat dan bekerja sama dengan rakyat yang memiliki status sosial tinggi, yakni seseorang yang memiliki kekuasaan, meski hanya sekadar ketua kampung.

Kelompok penjajah cenderung mengabaikan rasa kemanusiaan untuk melancarkan segala keinginan mereka dengan menerapkan kolonialisme sebagai akibat dari revolusi industri di Inggris (Hilman 2017). Revolusi industri di Inggris adalah peristiwa yang memicu bangsa Barat melakukan ekspedisi untuk memperluas kekuasaan di negara jajahan dengan tujuan untuk melancarkan penguasaan perdagangan di Eropa. Kelompok penjajah menjadikan penguasa wilayah setempat sebagai bagian dari sistem kekuasaan dan menjadi salah satu senjata untuk melancarkan pencapaian tujuan mereka.

Ia tiba-tiba teringat bahwa seberapa kuat pun ia membuktikan bahwa dirinya tidaklah terlibat dengan bapaknya, semua orang akan lebih kuat lagi untuk membunuhnya, terlebih sejak mereka tahu garis keluarganya, maka sampai detik ini pun ia terus saja dibabi-babikan. Sejauh ini Djoko Telu dan isterinya masih bisa tabah. Namun Djoko Telu tidak bisa mengambil resiko kalau kini

kompeni berhasil membakar amarah warga dan mulai membahayakan nyawa istri dan anaknya yang masih dalam rahim.

Istrinya pun ikut larut dalam kenyataan yang ada. Ia sudah beberapa kali diancam, dan sejak itu ia menjadi sulit tidur. Ia takut ketika terlelap akan ada yang membakar rumahnya atau tiba-tiba ada yang datang menusuk dirinya. Sejauh ini ketakutannya belum ada yang terjadi. Sebelum kompeni ikut campur, mereka hanya diasingkan oleh warga yang terlanjur segan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Djoko Telu. Kali ini ceritanya berbeda. Kompeni sedang menyusun strategi tertentu (73).

Kutipan di atas menunjukkan bentuk kekuasaan kaum penjajah berupa dominasi melalui ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh sekutu kompeni kepada keluarga Djoko Telu. Hal tersebut terjadi karena warga telah banyak mengetahui bahwa Djoko Telu merupakan anak dari Perompak Djaka. Karena beberapa sanak saudara mereka ada yang menjadi korban perompak Djaka, warga menjadi tersulut emosinya, sehingga menuruti segala perintah kompeni pada saat itu. Dominasi ancaman pembunuhan yang dilakukan warga sekitar membuat istri Djoko Telu merasa ketakutan apabila warga tiba-tiba melakukan kekerasan dengan menusuk suaminya ketika tidur dan membakar rumah mereka. Bentuk dominasi kekuasaan ini dilakukan oleh kompeni dengan memperlakukan warga setempat untuk melakukan segala sesuatu sesuai perintah kompeni. Tujuan kompeni menerapkan hal tersebut adalah untuk membuat masyarakat patuh terhadap kebijakan mereka meskipun dengan terpaksa.

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok penjajah menjadikan kelompok terjajah merasa dikuasai dengan segala kebijakan yang diterapkan. Pada dasarnya, bangsa kolonial yang datang ke Indonesia memilih jalan kekerasan dengan tujuan untuk memperoleh tiga hal, yakni *gold, gospel* dan *glory* (Wardhani 2017). Ketiga tujuan inilah yang mendorong bangsa Barat untuk mengarungi samudera hingga kemudian menemukan dunia Timur yang kaya akan rempah-rempah dan menimbulkan niat untuk menguasai wilayah tersebut.

Pintu dibuka dan matanya kesilauan sebab obor di mana-mana. Di hadapannya sudah ada seorang kompeni dan penerjemah bahasa yang ikut-ikutan berpakaian seragam.

Kau harus ikut kami untuk dihukum pancung di lapangan, kata Si penerjemah dengan penuh nada tidak enak. Djoko Telu bergeming dalam senyumnya. Persis dugaannya (79).

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa kelompok penjajah melakukan dominasi dalam bentuk kekerasan, yaitu berupa penetapan hukuman pancung pada kepada Djoko Telu. Alasan penetapan hukuman pancung tersebut karena Djoko Telu merupakan anak Perompak Djaka yang menjadi buron kelompok penjajah yang sudah bertekad untuk menumpas habis seluruh keturunan buronan mereka. Dalam kutipan tampak bahwa Djoko Telu hanya bisa pasrah kepada kelompok penjajah yang berhasil menangkapnya. Di sini terlihat bahwa kekuasaan kaum penjajah diwujudkan dengan dominasi kekerasan dan ancaman dengan tujuan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan mereka. Mau tidak mau, kelompok terjajah harus untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Apabila tidak, mereka akan mendapatkan hukuman mati atau tidak diterima di tanah yang telah dikuasai oleh kaum penjajah.

Pada konsep orientalisme, kelompok penjajah yang berasal dari bangsa Barat digambarkan memiliki bentuk tubuh yang ideal, yaitu gagah/cantik, berkulit putih, dan cerdas. Sementara pribumi merupakan representasi bangsa Timur diasosiasikan bertubuh pendek, berparas jelek, berkulit dekil, dan bodoh. Stigma yang berkembang juga menunjukkan bahwa bangsa Timur menganggap bangsa Barat lebih unggul sehingga mereka cenderung mengikuti apa kebiasaan bangsa Barat. Salah satu di antaranya yaitu penggunaan pakaian seragam.

Dihadapannya ada seorang kompeni dan penerjemah bahasa yang ikut-ikutan berpakaian seragam (79).

Dua orang pengawal berseragam yang tadi mengawasi salat Djoko Telu, kini berniat memborgol Djoko Telu (80).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa seragam digunakan sebagai suatu bentuk dominasi dari kelompok penjajah atas pribumi agar mereka merasa takut dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Tidak hanya itu, penggunaan seragam juga menjadikan pribumi menjadi objek hegemoni. Pengaruh hegemoni ini pada kaum pribumi salah satunya adalah seseorang yang mengenakan seragam dianggap memiliki status sosial tinggi dan patut dihormati. Ungkapan 'penerjemah bahasa yang ikut-ikutan berpakaian seragam' membuktikan bahwa pribumi yang telah menjadi bagian dari sistem kolonial atau blok intelektual telah terhegemoni dengan identitas seragam yang dikenakan oleh kelompok penjajah. Penerjemah bahasa dalam cerita tersebut telah diterima sebagai seorang intelektual. Ini terjadi karena pribumi memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu yang terlihat sama dengan penguasa pada saat itu, atau yang disebut dengan kelompok atas, akan tampak lebih terhormat dan mendapatkan sanjungan. Penggunaan seragam oleh dua pengawal kelompok kompeni tersebut juga sebagai alat untuk menakuti Djoko Telu agar ia mau menuruti apa yang diperintahkan oleh kompeni. Hegemoni semacam ini tidak hanya berlaku pada zaman kolonial. Sampai sekarang pun hegemoni dalam bentuk penggunaan pakaian seragam juga masih terjadi. Baik pegawai pemerintah maupun perangkat desa yang mengenakan seragam dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada rakyat pada umumnya.

Berakhirnya zaman kolonial salah satunya disebabkan karena semakin terbukanya pola pikir masyarakat Indonesia. Sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-19, masyarakat Indonesia mengalami masa empat abad sebagai kelompok terjajah. Politik bayar budi atau yang disebut dengan politik etis merupakan titik awal pendidikan, irigasi, dan imigrasi yang diberikan bangsa Belanda kepada Indonesia sebagai wujud ungkapan terima kasih dalam bentuk politik. Dengan terbukanya pola pikir pribumi, jalan menuju kemerdekaan semakin terbuka. Perjuangan yang dilakukan, baik secara fisik di medan pertempuran maupun diplomasi melalui meja perundingan, akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Mohamad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Masa kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta dikenal dengan nama Orde Lama.

Di akhir masa pemerintahan Orde Lama, terjadi pemberontakan G30S/PKI. Pada peristiwa tersebut enam jenderal diculik oleh beberapa anggota TNI AD yang tergabung dalam pasukan Tjakrabirawa untuk dimasukkan ke dalam lubang buaya (Sarhini 2017). Sejak saat itu, peristiwa

berdarah pembantaian masal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI dilakukan di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa.

Di tepi sungai dekat perkampungan yang tak banyak mengenal teknologi-teknologi, sedang ada peristiwa yang cukup bikin heboh warga-warganya. Mereka berdesak - desakan melihat beberapa orang yang diikat dengan tali tambang. Wajah-wajah itu babak belur dan membuat tampang mereka berubah drastis. Matanya membengkak hingga melorot, hidungnya memar, bibirnya pecah berhamburan tak karuan. Namun mereka masih hidup, untuk waktu yang tidak lama tentunya (12)

Ayah, ada pembantaian di pinggir sungai, kata Supri Kumbang terbata-bata. Mayatnya dibuang ke sungai! (14)

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui adanya bentuk kekuasaan berupa dominasi atau kekerasan yang dilakukan dengan cara membantai seluruh anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI. Situasi ini membuat masyarakat tidak mau bersinggungan ataupun ikut campur dalam urusan PKI sehingga muncul stigma bahwa PKI merupakan partai orang yang tidak beragama atau kafir. Stigma ini berkembang menjadi sebuah hegemoni bahwa seluruh anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI merupakan orang-orang komunis yang harus diberantas dan dijauhi ajarannya. Pemerintah Orde Baru berhasil mengendalikan PKI yang merupakan partai politik terbesar pada saat itu. Selain kalangan komunis, kaum Soekarno juga turut menjadi sasaran dalam pemberantasan PKI, sebagaimana terlihat pada kutipan berikut.

Sumpah Dongkel, bapakku taat beragama, Supri Kumbang sudah berkata demikian sejak hari pertama bapaknya tidak lagi di rumah.

Aku tidak meragukan sumpahmu, kata Dongkel, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang tidak kau tahu tentang bapakmu.

Supri Kumbang menggeleng-gelengkan kepala. Ia hanya setia dengan Bung Presiden, balasnya dengan yakin, Dongkel malah manggut-manggut (110).

Dalam kutipan di atas diceritakan bahwa sampai lima tahun lamanya, Djoko Tole dibawa oleh sekawanan orang berpakaian hitam dengan tanda khas Bung Presiden di bagian belakang baju mereka. Yang dimaksud Bung Presiden di sini adalah presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno (Bung Karno) yang pada saat itu sedang berada di ujung kekuasaannya. Dalam kalimat "Ia hanya setia dengan Bung Presiden", Supri Kumbang menjelaskan bahwa ayahnya merupakan seseorang yang sangat setia dengan Soekarno. Djoko Tole bukan orang PKI. Bentuk kekuasaan yang tampak dalam kutipan tersebut berupa dominasi atau kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh simpatisan PKI. Bahkan kaum Soekarno juga diberantas. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan suatu bentuk kekuasaan dominasi atau kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi yang dianggap melawan ideologi negara.

Lemahnya kekuasaan presiden di akhir masa Orde Lama mencapai puncaknya pada peristiwa penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Pelaku utama penculikan dan pembunuhan saat itu adalah Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Tjakrabirawa, yaitu pasukan khusus pengawal presiden (Septian 2018). Letkol Untung kemudian dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan PKI. Mengingat gentingnya situasi, Soekarno kemudian

menunjuk Mayjen Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban nasional. Pada akhirnya, Letkol Untung dijatuhi hukum mati. Demikian pula para anggota dan simpatisan PKI, banyak yang ditangkap dan diadili.

Zaman telah berganti dan memasuki masa Orde Baru dengan penguasanya, Soeharto. Pada masaini, banyak anggota masyarakat yang dianggap menyimpang dari garis kebijakan pemerintah, seperti preman-preman dengan tato di tubuhnya dihabisi oleh penembak runduk, seperti dalam kutipan berikut.

Supri Kumbang senang betul mengetahui temannya sudah menemukan jalannya sendiri. Seperti dirinya dengan jalannya yang memiliki tato naga, burung elang, serta ikan hiu martil.

Aku sebetulnya berharap orang yang dimaksud atasanku bukanlah engkau, tapi aku harus jujur, Supri, kau sedang menjadi target para penembak runduk, ucap Letnan Dongkel pelan-pelan (124).

Kutipan di atas menunjukkan bentuk kekuasaan dominasi atau kekerasan dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan. Dominasi dilakukan dengan menugaskan penembak runduk untuk melakukan penyamaran dan menghabisi pihak-pihak yang ingin memberontak dan melakukan penyelewengan. Seperti yang terjadi pada Supri Kumbang yang telah berkali-kali dilaporkan oleh pekerja pabrik lain atas perilakunya yang menarik upah lebih ketika mereka mencari muka kepada bos pabrik (120). Supri Kumbang juga menggambar beberapa tato untuk menakut-nakuti pekerja lain. Akan tetapi, akibatnya, Supri Kumbang menjadi incaran penembak runduk yang ingin menghabisinya. Letnan Dongkel, sahabatnya, kemudian menyarankan agar Supri Kumbang mengasingkan diri ke hutan yang belum terjamah oleh penembak runduk, sebelum ia ditemukan mati seperti mayat-mayat bertato lainnya. Supri Kumbang disarankan bersembunyi sampai mendapat kabar bahwa penembak runduk sudah tidak ada lagi di negerinya (129, 142).

Sekembali dari pengasingannya di hutan, Supri Kumbang semakin kritis dan mengecam tindakan para pemilik modal yang berbuat semena-mena terhadap warga. Bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa menimbulkan banyak pertentangan, khususnya antara Supri Kumbang sebagai salah satu kaum intelektual yang menuliskan isi hatinya di koran dan rakyat kecil lain. Supri Kumbang terpicu untuk menuliskan keluh kesah warganya. Ia sengaja menutupi identitasnya dengan nama samaran. Nama samaran yang dipilihnya adalah Pohon Kumbang, sebuah nama yang masih identik dengan Supri Kumbang, sehingga membuat Letnan Dongkel menyesal mengapa Supri Kumbang memilih nama samaran itu. Beberapa waktu kemudian, dengan berat hati, Letnan Dongkel, yang merupakan anggota TNI, memberitahukan bahwa Supri Kumbang akan ditangkap dan dibuang oleh negara karena telah membuat resah kelompok pemilik modal (152).

Akibat kritik yang diutarakan melalui tulisannya, Supri Kumbang menjadi buron dan diharuskan pergi untuk mengasingkan diri agar tidak diketahui keberadaannya oleh pemerintah. Supri Kumbang menyadari bahwa penembak runduk berada di manapun sehingga ia harus berhati-hati agar pengasingannya tidak diketahui oleh orang lain. Tidak hanya mengalami pengasingan, akibat dari tulisannya, Supri Kumbang juga sempat menjalani

hukuman selama 15 tahun di dalam penjara seperti tampak pada kutipan berikut.

Kau membuat para warga makin sadar terhadap hak-haknya dan memilih untuk tidak memberikan tanah mereka. Selain itu, juga semakin banyak yang membuat tulisan semacam itu (154).

Kau harus mempersiapkan dirimu untuk dibuang oleh negara, Letnan Dongkel benci harus mengatakan ini. Kau dicap sebagai bagian dari orang-orang tak beragama. Bahkan mereka berspekulasi kalau kau yang membuat pemerintah dikecam karena aksi penembakan preman-preman itu, jelas Letnan Dongkel sambil memijit-mijit keningnya (155).

Anjing! Suara Supri Kumbang memecah udara yang pengap dalam ruangan itu. Seketika penjaga masuk ke dalam sel tempat Supri Kumbang berbaring. Rambutnya dijambak dan ia diseret keluar dengan paksa. Pada malam-malam di pembuangan, sering terjadi hal-hal semacam ini (168).

Berdasarkan kutipan tersebut, bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penggunaan dominasi atau kekerasan. Penggunaan kekerasan ini berupa pengeblosan Supri Kumbang ke dalam penjara karena telah menentang pemerintah dan perusahaan swasta melalui kritik yang disampaikan dalam bentuk tulisan di koran. Supri kumbang sebagai salah satu kaum intelektual yang ingin membuka pikiran rakyat agar tidak mau dibodohi oleh perusahaan pemilik tanah untuk menjual tanah dengan harga yang sangat murah. Sesuatu yang menjadikan keuntungan perusahaan menjadi semakin meningkat tetapi berakibat pada kesengsaraan rakyat (150). Tidak hanya itu, dasar pembuangan yang dialami oleh Supri Kumbang karena tulisan kritiknya, hingga menimbulkan anggapan bahwa ia harus dibantai memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi pada kelompok orang-orang tidak beragama puluhan tahun lalu ketika Supri Kumbang masih kecil. Dari sini terlihat bahwa dominasi atau kekerasan masih dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan menggunakan penyamaran di setiap langkah kebijakannya.

Repetisi Bentuk Kekuasaan Zaman Kolonial pada Masa Orde Baru

Zaman kolonial merupakan dampak dari kolonialisme yang berarti suatu paham penguasaan dari suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan memperluas kekuasaan dengan melakukan ekspedisi negara tersebut (Batubara & Aman, 2019). Penguasaan suatu negara oleh bangsa Barat dilakukan dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Tujuan ini dicapai melalui ekspedisi pelayaran dengan mengarungi lautan luas untuk mencari dunia Timur. Ekspedisi tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah.

Kedatangan bangsa Barat di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan baru. Kedatangan mereka pada awalnya dilakukan secara baik-baik sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Akan tetapi, di kemudian hari dijalankanlah kekuasaan yang penuh dengan kekerasan untuk melancarkan tujuan mereka tersebut. Struktur sosial yang ada pada zaman kolonial ini terlihat sangat kontras, terdiri atas kelompok penjajah dan kelompok terjajah. Kelompok penjajah diwakili oleh kompeni yang berhasil menguasai Indonesia. Aparatur daerah yang berkoloni dengan kompeni juga termasuk kelompok penjajah karena mereka mendapatkan keuntungan dari penderitaan kelompok pribumi. Sementara, kelompok terjajah, yaitu pribumi, mau tidak mau harus menuruti segala bentuk aturan yang ditetapkan. Beberapa aparat daerah, seperti ketua kampung, ada yang melakukan koalisi dengan kompeni. Koalisi tersebut menjadikan kelompok penjajah, yaitu kompeni, dapat dengan mudah melancarkan aksi penjajahan di

daerah tersebut. Imbalan bagi ketua kampung berupa jatah yang sangat tinggi dari kelompok penjajah. Sementara itu, struktur sosial yang terdapat di masa Orde Baru meliputi pemerintah, pemilik modal, dan rakyat. Pemerintah berhasil menerapkan segala kebijakannya untuk dipatuhi rakyat. Di sisi lain, terdapat pula kelompok pemilik modal yang berhasil menguasai perdagangan sekaligus menyengsarakan rakyat kecil. Sebagaimana penguasa, pemilik modal juga menguasai rakyat kecil, meskipun demikian, pemilik modal masih berada di bawah penguasaan pemerintah.

Perwujudan suatu struktur sosial berimbang pada bentuk kekuasaan yang dijalankan. Struktur sosial yang terdapat di zaman kolonial ditandai dengan adanya tingkatan paling tinggi, yaitu penjajah, yang disusul kemudian dengan pribumi yang memiliki jabatan seperti ketua kampung, sedangkan tingkatan yang terakhir adalah pribumi sebagai kelompok terjajah. Sementara itu, struktur sosial yang terdapat pada masa Orde Baru berturut-turut dari yang paling tinggi yaitu Pemerintah, disusul kemudian kelompok pemilik modal, dan rakyat biasa. Adanya hierarki tiga tingkatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara zaman kolonial dan masa Orde Baru. Struktur sosial tersebut berdampak pada bentuk kekuasaan yang dijalankan. Pada zaman kolonial terjadi suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok penjajah yang disebut dengan istilah kompeni. Kompeni melakukan tindakan dalam bentuk mengancam dan menarik pajak yang terlampaui tinggi kepada pribumi sebagai kelompok terjajah. Pribumi merasa sangat resah akan adanya penetapan kebijakan yang sangat menyengsarakan kehidupan tersebut. Selain itu, hegemoni juga diwujudkan dalam bentuk identitas seragam yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa seseorang yang mengenakan pakaian seragam berhak untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Di masyarakat juga berkembang stigma jika bangsa Barat berada pada posisi unggul dalam segala bidang. Terlihat pula bahwa hegemoni dengan identitas seragam juga ditiru oleh beberapa pribumi yang menjadi koloni kompeni. Masyarakat telah terhegemoni bahwa bangsa Barat dengan segala perilakunya memiliki keunggulan di segala bidang.

Penerapan berupa bentuk dominasi kekerasan pada zaman kolonial ditujukan untuk melancarkan aksi penjajahan. Pada masa ini, pribumi merupakan kelompok masyarakat awam yang belum mengenal pengetahuan, sehingga dengan sangat mudah dapat dikuasai oleh kompeni. Akibat dari bentuk kekuasaan ini, pribumi merasa terpinggirkan dan berusaha melakukan sebuah perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh pribumi juga dalam bentuk kekerasan yang di dalam novel diceritakan bahwa Djaka menjadi seorang perompak untuk menghalangi niat buruk kompeni yang ingin menguasai laut Indonesia pada waktu itu.

Berakhirnya zaman kolonial, menjadikan Indonesia memasuki babak baru pemerintahan yaitu memasuki masa Orde Lama. Berakhirnya zaman ini karena konstelasi politik pada waktu itu sangat tidak stabil. Transisi dari masa Orde Lama menuju Orde Baru ditandai dengan peristiwa pemberontakan G30S/PKI yang kemudian bisa ditumpas oleh Mayjen Soeharto hingga ke akar-akarnya. Bentuk kekuasaan yang berlangsung pada akhir masa Orde Lama juga ditandai dengan adanya dominasi atau kekerasan, yaitu dengan menghabsi PKI yang merupakan organisasi terbesar pada saat itu. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan pergantian kekuasaan, yaitu diangkatnya Soeharto sebagai presiden RI. Struktur sosial yang terdapat pada masa Orde Baru ditandai dengan keberadaan pemerintah dan pemilik modal yang berperan sebagai kelompok penguasa. Kemudian, kelompok kedua, yang melakukan perlawanan disebut kaum intelektual, sedangkan kelompok ketiga adalah pihak yang dikuasai yaitu rakyat biasa.

Penguasa pada masa Orde Baru menjalankan kekuasaan dengan kekerasan dan hegemoni. Kekerasan ini ditandai dengan ancaman penembakan misterius bagi siapapun yang tidak melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam novel diceritakan banyaknya preman yang dibunuh oleh penembak misterius dan kemudian dibuang ke hutan. Preman dianggap sebagai seseorang yang membangkang terhadap negara sehingga penembak misterius diperintahkan untuk mengabisi preman-preman tersebut. Tujuan dari penembakan misterius yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah agar sistem pemerintahan berjalan dengan tertib dan tidak seorang pun berani melawan pihak penguasa.

Perlawanan oleh rakyat yang mencoba menolak bentuk kediktatoran penguasa dilakukan dengan memberikan kritikan dan sindiran melalui karya-karya tulis, seperti tulisan di koran atau penciptaan puisi. Seseorang yang melakukan perlawanan melalui kritikan dan sindiran dalam bentuk karya tulis disebut kaum intelektual. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum intelektual bukan dengan dominasi atau kekerasan akan tetapi melalui kritik yang disampaikan kepada penguasa melalui tulisan yang sarat akan makna.

Pengulangan struktur sosial di zaman kolonial yang terjadi pada masa Orde Baru terlihat pada adanya satu kelompok yang berperan secara dominan dalam sistem kekuasaan. Kelompok dominan cenderung menjalankan kekuasaan diktatorial untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa pada zaman kolonial juga dapat dijumpai pada masa Orde Baru. Bentuk kekuasaan berupa dominasi ancaman dan kekerasan masih dijlankan oleh penguasa Orde Baru. Perbedaan antara bentuk kekuasaan zaman kolonial dan Orde Baru terletak pada pelakunya. Jika pada zaman kolonial pelaku kelompok dominan diwakili oleh bangsa Barat dengan kelompok pribumi sebagai objeknya, maka pada masa Orde Baru pelaku dominasi adalah kelompok pemerintah dengan objek rakyatnya sendiri.

Struktur sosial dan bentuk kekuasaan pada masa Orde Baru sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan adanya kekuasaan yang mengikat dan ortodoks dan merupakan pengulangan dari apa yang terjadi pada zaman kolonial. Kekuasaan yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut termasuk dalam kategori neokolonialisme. Neokolonialisme pertama kali dikenalkan oleh Soekarno dengan sebutan 'nekolim' yaitu neokolonialisme dan imperialisme. Neokolonialisme merupakan suatu bentuk penguasaan baru dengan tata cara kelola yang baru pula. Pada zaman kolonial, penguasaan dilakukan dengan kekerasan dan penjajahan. Neokolonialisme juga menerapkan sistem penguasaan yang sama tetapi dengan bentuk penjajahan yang berbeda (Legowo, Krisnadi & Sumartono 2013). Neokolonialisme menjadi hal yang sangat diperhatikan sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sistem kekuasaan yang diterapkan pemerintah Orde Baru merupakan salah satu bentuk penjajahan baru setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Ini dapat dibuktikan dengan penjelasan di atas bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah masih menerapkan bentuk kekuasaan berupa dominasi atau kekerasan dengan menyamakan sebutan bagi kelompok pelaku dominasi dengan istilah 'penembak runduk' dan kelompok kemeja hitam khas dengan simbol burung (125).

KESIMPULAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan sistem kekuasaan yang terdapat pada zaman Kolonial dan zaman Orde Baru. Kekuasaan tersebut terbagi atas struktur sosial yang terlibat dan bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa. Struktur sosial terdiri atas dua kelompok sosial yang bertindak sebagai penguasa dan yang dikuasai. Pada zaman Kolonial terdapat dua kelompok sosial yaitu: (1) kelompok penjajah yang diwakili oleh

bangsa Barat yang di dalamnya juga terdapat kelompok pribumi yang memiliki jabatan seperti ketua kampung; dan (2) kelompok terjajah yaitu pribumi. Ketua kampung masuk dalam kelompok penguasa sekaligus berada dalam penguasaan kelompok penjajah sedangkan pribumi menjadi kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, muncul hierarki kekuasaan di zaman kolonial yaitu kelompok penjajah, perangkat desa, dan pribumi. Pada masa Orde Baru terdapat dua kelompok sosial, yaitu pemerintah, yang di dalamnya juga terdapat kelompok pemilik modal, dan rakyat. Pemilik modal masuk dalam struktur sosial kelompok penguasa namun posisinya masih berada di bawah pemerintah sedangkan rakyat masih tetap menjadi kelompok termarginalkan. Dari sini muncul hierarki kekuasaan pada masa Orde Baru, yaitu pemerintah, pemilik modal, dan rakyat.

Terdapat persamaan bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok penguasa pada zaman Kolonial dan masa Orde Baru yaitu adanya dominasi atau kekerasan seperti ancaman pembunuhan dengan memeralat warga untuk melakukannya. Pada zaman Orde Baru kekerasan dilakukan oleh kelompok penyamar, seperti penembak runduk dan kelompok kemeja hitam dengan simbol burung. Rakyat sebagai kelompok yang termarginalkan juga berusaha melakukan perlawanan, ketika hegemoni yang dilakukan pemerintah semakin merosot. Pada zaman kolonial, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok terjajah dilakukan dengan kekerasan pula, seperti menjadi sebuah perompak, sedangkan pada masa Orde Baru, perlawanan dilakukan oleh rakyat yang dikenal sebagai kaum intelektual dengan hegemoni berupa kritik dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada pemerintah dan pemilik modal.

Apabila struktur sosial dan bentuk kekuasaan yang terdapat pada masa Orde Baru kita amati, maka akan terlihat adanya pengulangan sistem kekuasaan yang pernah dijalankan bangsa kolonial terhadap pribumi. Pada era pascakolonialisme ternyata ditemukan adanya bentuk kekuasaan yang sifatnya diktator dengan maksud agar rakyat dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemerintah. Pengulangan sistem kekuasaan zaman kolonial pada masa Orde Baru ini memperlihatkan adanya suatu bentuk penjajahan model baru yang dikenal dengan nama 'neokolonialisme'.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Khairul. 2017. "Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK Media Pemikiran & Aplikasi* 11 (2). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/10096/>
- Ananta, M. Abroor Firman. 2017. "Novel *Tan* Sebuah Novel Karya Hendri Teja: Kajian Postkolonialisme." *Bapala* 4 (1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/19631/>
- Anwar, Ahyar. 2015. *Teori Sosial Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ardiono, Haerun Nisa, & Erny Harijaty. 2019. "Ketidakadilan Sosial dalam Novel *Pulang* Karya Leila S. Chudori (Tinjauan Sosiologi Sastra)." *Bastra: Bahasa dan Sastra* 4 (1): 90-105. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BASTRA/>
- Batubara, Ulfah Nury, & Aman. 2019. "Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8 (1). <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/ips/issue/view/858/>
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service
- Faruk. 2015. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers
- Gramsci, Antonio, Richard Bellamy, & Virginia Cox. 1994. *Gramsci Pre-Prison Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hadi, Dwi Wahyono, & Gayung Kasuma. 2012. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Verleden* 1 (1). <https://journal.unair.ac.id/>
- Harkantingsih, Naniek. 2014. "Pengaruh Kolonial di Nusantara." *Kalpataru* 23 (1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24832/kpt.v23il.51/>
- Hilman, Iman. 2017. "Imperialisme Dan Kolonialisme." *Paper Universitas Indonesia*. <http://staff.ui.ac.id/>
- Irwan, Alexander, & Edriana. 1995. *Pemilu - Membatalkan Asas Luber: Hegemoni Tak Sampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Legowo, Sivfian Hendra, IG. Krishadi & Hendro Sumartono. 2013. "Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia: Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Tahun 1990-1996." *Publika Budaya*, 1 (1). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/334>
- Marlina, Dewi. 2017. *Analisis Poskolonialisme Dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur*. (Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji). http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/
- Mujianto, Gigit. 2019. "Peningkatan Hasil Belajar Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi Pada Peserta Didik Kelas X SMAN 7 Malang Dengan Model Pembelajaran Integratif." *JINoP: Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 5 (1): 39. <https://doi.org/10.22219/jinop.v5i1.7244>
- Nasrullah, Mochamad. 2019. *Balada Supri*. Jakarta Utara: Penerbit Anagram
- Patria, Nizar & Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purnaweni, Hartuti. 2004. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (2). <http://eprints.undip.ac.id/5316/>
- Sanita, Meigitaria & Puji Rianto. 2018. "Hantu PKI dan Ujung Rekonsiliasi (Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo Pada Majalah Tempo Dan Gatra)." *Jurnal Komunikasi*, 12 (2). <https://journal.uii.ac.id/>
- Sarbini, Ibin. 2017. *Kiprah Pelajar Islam Indonesia (PII) dalam Kancah Perpolitikan Pada Masa Transisi Pemerintahan di Indonesia Tahun 1965-1967*. Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
- Septian, Aldi. 2018. "Cakrabirawa dalam Kekuatan Militer Era Kepemimpinan Soekarno 1962-1967." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 3 (4). <https://jurnal.student.uny.ac.id/>
- Sugjarti. 2016. "Kesadaran Ketuhanan Tokoh Utama dalam Kumpulan Cerpen Ketika Mas Gagah Pergi dan Kembali Karya Helvy Tiana Rosa." *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 2 (1): 90-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/KEMBARA>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhar, Muhammad, Yusak Hudiyono, & Irma Surayya Hanum. 2019. "Analisis Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur: Sebuah Kajian Hegemoni Gramsci." *Jurnal Ilmu Budaya*, 3 (4). <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/jbssb/>
- Supriyadi, Hasan. 2018. "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia." *Jurnal Agregasi*, 6 (2). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/1136/>
- Wardhani, Baiq LSW. 2017. "Respon Poskolonial Terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika." *Jurnal Global & Strategis*, 10 (1): 137. <https://doi.org/10.20473/jgs.10.1.2016.137-151>